



**PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI
BADAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

**(Putri Mayang Sari, 2220112009, Program Studi Magister Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 2024)**

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja telah mengubah beberapa materi Undang-Undang lain, dimana salah satu Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kondisi ini diakibatkan dengan lahirnya gagasan untuk membangun iklim hukum yang dapat memayungi banyaknya regulasi yang ada di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan aspek perekonomian dan investasi dengan menerapkan metode *Omnibus Law* dalam proses pembentukan Undang-Undang. Hal tersebut pada akhirnya berdampak terhadap banyak aspek perekonomian khususnya untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil (UMK). Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2023, lahir sebuah konsep badan usaha baru pada Perseroan Terbatas, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, Perseroan Perorangan tersebut dikonsepsikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan dapat didirikan serta dimiliki oleh satu orang saja. Selain itu, eksistensi dari Perseroan Perorangan melahirkan konsekuensi terhadap ketidaksiannya dengan doktrin *separate entity* yang menghendaki adanya pemisahan harta kekayaan dan doktrin *limited liability* yang menghendaki adanya pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham Perseroan. Hal tersebut penting untuk menjamin terlaksananya fungsi *check and balances* dalam tiap pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan Terbatas. Berdasarkan persoalan tersebut, maka akan dirumuskan pada rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah dapat diterapkan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) pada Perseroan Perorangan sebagai badan hukum? Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham pada Perseroan Perorangan? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, diperoleh kesimpulan bahwa status badan hukum Perseroan Perorangan telah memenuhi syarat formil sebagai badan hukum yakni adanya pengesahan oleh negara sehingga prinsip PT yaitu *limited liability* dapat diterapkan pada Perseroan Perorangan. Kedua, pertanggungjawaban dari Perseroan Perorangan sama halnya dengan Perseroan Persekutuan Modal.

Kata Kunci: Badan Hukum, Perseroan Perorangan, *Limited Liability*

RESPONSIBILITY OF INDIVIDUAL COMPANIES AS LEGAL ENTITIES ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW

**(Putri Mayang Sari, 2220112009, Master of Law Study Program, Faculty of
Law, Andalas University, 2024)**

ABSTRACT

The presence of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has changed several other laws, where one of the laws affected is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This condition was born with the birth of the idea to build a legal climate that could cover the many regulations that exist in Indonesia, especially those relating to economic and investment aspects by applying the Omnibus method in the process of forming laws. This ultimately has an impact on many aspects of the economy, especially increasing the ease of doing business for business actors, especially micro and small businesses (MSEs). Since the promulgation of the Job Creation Law in 2023, a new business entity concept was born in Limited Liability Companies, namely Individual Companies. In this case, the Individual Company is conceptualized as a business entity that is a legal entity and can be established and owned by just one person. In addition, the existence of an Individual Company has consequences regarding its incompatibility with the separate entity doctrine which requires limitations on assets and the limited liability doctrine which requires limited liability for the Company's shareholders. This is important to ensure the implementation of the checks and balances function in every strategic decision making for Limited Liability Companies. Based on these problems, the problem formulation will be formulated as follows. First, can limited liability be applied to individual companies as legal entities? Second, what are the responsibilities of shareholders in individual companies? This research uses a normative juridical research type. The data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research results, firstly, it was concluded that the legal entity status of an Individual Company has met the formal requirements as a legal entity, namely the existence of approval by the state so that the PT principle, namely limited liability, can be applied to Individual Companies. Second, the responsibilities of an Individual Company are the same as those of a Capital Partnership Company.

Keywords: Legal Entity, Individual Company, Limited Liability